

## **PEMODELAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK BINER**

### **MODELING COMMUNITY PERCEPTIONS ON THE JOB CREATION ACT USING BINARY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS**

**D. Venosia<sup>1a</sup>, H.W. Nugroho<sup>2</sup>, A.Z. Nabila<sup>3</sup>, Sediono<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Jl.  
Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya

<sup>a</sup> Korespondensi: Dhyana Venosia, E-mail: [dhyanavenosia02@gmail.com](mailto:dhyanavenosia02@gmail.com)

(Diterima: 06-08-2021; Ditelaah: 07-08-2021; Disetujui: 30-09-2021)

#### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to examine the functional model of the Surabaya City community's opinion of the Job Creation Act, which was prompted by the actions on October 6, 7, and 8, 2020. It was sparked by the ratification of the Job Creation Act, which sparked public debate over its pros and cons. The pension insurance program is one of the topics discussed in the Job Creation Act. The study employs a technique that has never been employed before. Binary Logistics Regression Analysis was the method employed in this study. The perception of the pension insurance program in Surabaya was the dependent variable in this study, which included three independent variables: age, residence, and occupation. This study relies on primary data with a 0.1 alpha. The result of the study shows that the degree of significance expressed in the age group of 18-25 years is 0.003, domicile in East Surabaya is 0.062, and student or student work is 0.085, all of which impact the public opinion of the city of Surabaya concerning the pension insurance program.

Keywords: Age, Domicile, Job, Pros and Cons, Pension Guarantee Program.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model fungsional pada opini masyarakat Kota Surabaya terhadap Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, yang didorong oleh tindakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober 2020. Hal itu disebabkan oleh pengesahan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. UU, yang mengakibatkan perdebatan publik atas pro dan kontra. Program jaminan pensiun merupakan salah satu topik yang dibahas dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan teknik yang belum pernah digunakan sebelumnya. Analisis Regresi Logistik Biner merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Persepsi terhadap program jaminan pensiun di Surabaya merupakan variabel terikat dalam penelitian ini yang meliputi tiga variabel bebas yaitu umur, tempat tinggal, dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan alpha 0,1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat signifikansi yang dinyatakan pada kelompok umur 18-25 tahun sebesar 0,003, berdomisili di Surabaya Timur sebesar 0,062, dan karya siswa atau mahasiswa sebesar 0,085, yang kesemuanya berdampak pada opini publik kota Surabaya terkait program jaminan pensiun.

Kata Kunci: Domisili, Pekerjaan, Pro dan Kontra, Program Jaminan Pensiun, Umur.

---

Venosia. D., Nugroho. H.W., Nabila A.Z. & Sediono. (2021). Permodelan persepsi Masyarakat Kota Surabaya Terhadap Undang- Undang Cipta Kerja dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner. *Jurnal Sosial Humaniora* 12(2). 109-118.

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana tertuang pada “UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)”. Menurut Astari (2021:51), sebagai negara hukum, Indonesia mengekspresikan cita-cita atau tujuan negara melalui hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional yang dikejar. Dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat, bangsa, dan negara diperlukan aturan hukum yang sesuai berdasarkan tata urutannya. “Pasal 2 Tap MPR No. III/MPR/2020” berisi “Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan” Republik Indonesia sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; dan Peraturan Daerah”. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya. Pembagian suatu daerah sendiri diatur pada “UUD 1945 Pasal 18 ayat (1)” berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi dengan Jawa Timur salah satunya dan Surabaya sebagai ibu kotanya.

Sebagai ibu kota, Kota Surabaya menjadi pusat bagi sektor ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan lainnya. Perekonomian merupakan salah satu hal yang diperhatikan DPR untuk menciptakan “keselarasan pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian” sebagaimana yang

tertuang pada “Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab II Pasal 2”. Pemerintah bersama DPR RI telah bersepakat mengesahkan UU Ciptaker tepat pada tanggal 5 Oktober 2020. Menurut Gultom & Fauzi (2021:53), dalam pengesahan UU Ciptaker memuat banyak ayat yang dianggap kontroversi. Fenomena ini, menciptakan persepsi pro/kontra masyarakat Kota Surabaya sehingga memicu terjadinya aksi pada tanggal 6,7, dan 8 Oktober 2020 dengan tujuan menolak pengesahan UU Ciptaker.

UU Ciptaker dinilai sangat relevan dengan keadaan saat ini, terutama terkait program jaminan pensiun. Menurut Yunawati (2016:118) program jaminan pensiun dapat menciptakan rasa aman bagi karyawan, terutama bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaan. Namun, realitanya selama ini undang-undang belum mengatur secara tegas dan jelas terkait batasan usia pensiun bagi pekerja/buruh. (Soleh, 2018:1). Selain itu, berdasarkan realita masih banyak ditemukan para pekerja kontrak yang belum sepenuhnya mendapat perlindungan terkait program jaminan pensiun yang sesuai dengan “Peraturan Perundang-undangan”. Pengesahan UU Ciptaker khususnya program jaminan pensiun menuai terjadinya perbedaan persepsi politik pro/kontra masyarakat Kota Surabaya dengan Pemerintah. Maka diperlukan sebuah penelitian berbasis pemodelan dan analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Soleh (2018), pada penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak di Jawa Timur*”, dan Farza, dkk (2019) pada penelitiannya yang berjudul “*Jaminan Pensiun Pekerja Kontrak Dalam Rangka*

*Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak*” juga membahas terkait program jaminan pensiun.

Metode analisis yang sesuai untuk memodelkan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kota Surabaya tersebut, yaitu regresi logistik biner. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi UU Ciptaker dan pengaplikasiannya khususnya di Kota Surabaya terkait program jaminan pensiun. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, dimana metode yang digunakan belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan terobosan baru. Hal ini, membuat peneliti tertarik sehingga melakukan penelitian berbasis statistika sosial yang berjudul **“Pemodelan Persepsi Masyarakat Kota Surabaya Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner”**.

## MATERI DAN METODE

### Rumusan Masalah

Setelah mengamati fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan metode analisis yang akan digunakan, maka peneliti mengusung sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana model fungsional dari persepsi masyarakat Kota Surabaya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terkait program jaminan pensiun?”

### Tujuan Penelitian

Adanya suatu penelitian, pasti memiliki sebuah tujuan agar penelitian yang dilakukan memberikan kebermanfaatan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, tujuan yang dituju peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

“Menganalisis model fungsional dari persepsi masyarakat Kota Surabaya

terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terkait program jaminan pensiun”.

### Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi dengan dimulainya saat seseorang menerima rangsang dari alat indera. Persepsi itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan suatu pemikiran agar mudah dimengerti oleh banyak orang. Dalam pembentukan suatu persepsi akan menciptakan suatu penilaian pada objek yang ditangkap oleh alat indera. Penilaian yang terbentuk akan menciptakan sebuah asumsi. Asumsi itulah yang disebut persepsi. Namun, penilaian seseorang terhadap objek cenderung berbeda sehingga menciptakan sebuah persepsi yang berbeda pula. Oleh karena itu, hal ini mengindikasikan bahwa persepsi antara individu satu dengan yang lain tidak selalu sama tergantung dari telaah alat indera dan pemikiran individu itu sendiri. Maka, persepsi membentuk bagaimana manusia memahami orang lain dan dunianya sekaligus berbagai pilihan yang diambil dalam hidup mereka (Jayanti & Arista, 2018:208).

### Masyarakat

Menurut “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat (1)”, berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.”. Kemudian, pada “Ayat (2)” menjelaskan terkait pengertian dari penduduk yang berbunyi “Penduduk ialah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Menurut “Undang-Undang Pasal 1 Ayat (15)”, yang berbunyi “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”. Sedangkan pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah para individu yang melakukan aktivitas bersama dengan dipandu oleh peraturan dan tatanan kehidupan dalam lingkungan dimana dia tinggal. Oleh karena itu, dapat diambil

kesimpulan bahwa masyarakat merupakan bagian dari penduduk.

### Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja” atau yang biasa disebut dengan UU Ciptaker adalah “Undang-Undang” yang mengatur tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan kristalisasi regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu payung hukum (Sjaiful, 2021:38). Menurut “Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1)”, yang berbunyi “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional”. Dijelaskan pula pada “Pasal (3)” terkait tujuan dari pembentukan “Undang-Undang” ini, antara lain: “a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”. Menurut Dahwir (2020:165), terkait pengesahan UU Ciptaker,

Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru sehingga mengabaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya transparan, akuntabel, *prudence*, dan partisipatif. Secara yuridis UU Ciptaker tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh (Matompo, 2020:28). Oleh karena itu, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai bahwa dalam proses penyusunan *omnibus law* adalah keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha (Razy & Ferdryansyah, 2020).

### Survei

Survei merupakan metode atau cara pada sebuah penelitian yang berguna dalam mendapatkan data yang bersifat alami. Menurut pelaksanaannya, survei dapat dibedakan menjadi survei *online* dan survei *offline*. Survei *online* merupakan suatu alat pengumpulan data dimana tidak melakukan interaksi tatap muka secara langsung dengan responden. Sedangkan, survei *offline* merupakan suatu alat pengumpulan data dimana melakukan interaksi tatap muka langsung dengan responden. Dalam hal ini, pemilihan metode yang digunakan pada survei juga memberi pengaruh pada tingkat akurasi data yang diperoleh. Kemudian, survei juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara (Adiyanta, 2019:697).

### Proportional stratified random sampling

*Proportional stratified random sampling* merupakan salah satu teknik pada kelompok *probability sampling*. *Probability sampling* merupakan salah satu kelompok yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada setiap

anggota populasi untuk terpilih menjadi sebuah sampel penelitian dimana pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *random* atau acak. *Proportional stratified random sampling* adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara proporsional (Nurmalasari, 2014:189). Strata yang digunakan umumnya sebagai penunjang penelitian. Sehingga, diharapkan data dapat memenuhi asumsi metode yang digunakan.

### Analisis Regresi Logistik Biner

Analisis regresi logistik biner adalah salah satu bagian dari analisis regresi logistik. Menurut Kotimah & Wulandari (2014:1), regresi logistik biner adalah suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependen (y) yang bersifat biner dengan variabel independen (x). Regresi logistik biner dibagi menjadi 3 model, yaitu logit, probit, dan gompit. Model logit biner merupakan model regresi dengan variabel dependen terdiri dari dua kategorik, sedangkan variabel independennya boleh bersifat kategorik maupun kontinu dan probabilitas sukses hasil percobaan didasarkan pada distribusi logistik. Model probit biner merupakan pemodelan regresi yang didasarkan pada konsep probabilitas dengan fungsi link logit.

$$g(\pi_i) = X_i\beta ; I = 1, 2, \dots, N$$

dengan

$$g(\pi_i) = \ln\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) \text{ adalah fungsi link logit}$$

$$X_i = (1, X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ip})$$

adalah vektor yang berasal dari

variabel independen ke-*i*

pengamatan.

$$\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)'$$

adalah variabel parameter penelitian yang bersesuaian dengan suatu variabel independen.

### Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan mengidentifikasi pengaruh variabel independen dan dependen kemudian berusaha mencari penyebab kausalitas tersebut serta dibandingkan juga hasil analisisnya guna menentukan preferensi keputusannya. Penelitian ini dilakukan secara virtual digital, daring, dan luring yang berlokasi di Kota Surabaya dengan durasi kurang lebih selama tiga bulan.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui survei yang dilakukan dengan virtual digital, daring dan luring dengan menggunakan google formulir yang dipublikasikan ke beberapa media sosial serta melakukan wawancara secara langsung dimana tetap mematuhi protokol kesehatan saat proses survei *offline* sedang berlangsung. Mengenai ukuran sampel, Sugiyono (2012:91) memberikan saran bahwa jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 dengan batas toleransi reduksi maksimal 10%. Strata yang digunakan dalam penelitian ini adalah domisili tempat tinggal responden. Maka, berdasarkan perhitungan diperoleh sampel pada masing- masing strata, sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Strata	Sampel
Surabaya Timur	27
Surabaya Barat	17
Surabaya Pusat	11
Surabaya Utara	20
Surabaya Selatan	25

Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Surabaya, berusia tidak kurang dari 18 tahun, memiliki pekerjaan, dan memiliki persepsi baik pro/kontra terhadap UU Ciptaker pada program jaminan pensiun yang harus diatur secara jelas dan sistematis.

### Penentuan Variabel dan Definisi Konsep

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2. Variabel Independen penelitian

Usia	(1) 18-25 Tahun
	(2) 25-40 Tahun
	(3) >40 Tahun
Domisili	(1) Surabaya Timur
	(2) Surabaya Barat
	(3) Surabaya Pusat
	(4) Surabaya Utara
	(5) Surabaya Selatan
Pekerjaan	(1) Pelajara/Mahasiswa
	(2) PNS
	(3) Non PNS

Variabel dependen penelitian ini menggunakan persepsi pro/kontra masyarakat Kota Surabaya terhadap UU Ciptaker terkait progam jaminan pensiun

yang harus diatur secara jelas dan sistematis.

Prosedur kerja dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 langkah, yaitu pengambilan sampel, analisis data, dan yang terakhir penafsiran dan penyimpulan hasil. Penafsiran hasil analisis dilakukan dengan cara menyajikan hasil dalam beberapa komponen disertai dengan interpretasi yang bersifat faktual. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan dengan pembuatan model hubungan fungsional, pemaparan hasil analisis, dan penjelasan preferensi subjek penelitian atas keputusan/persepsi yang dipilih.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode analisis yang digunakan, data yang diperoleh untuk digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Rentang Usia Responden

Rentang Usia	Frekuensi	(%)
18 - 25	87	87
25 - 40	3	3
> 40	10	10
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 3. terlihat bahwa dari 100 responden, 87 orang diantaranya berusia 18 hingga 25 tahun, 3 orang diantaranya berusia 25 hingga 40 tahun, dan sisanya sebanyak 10 orang berusia di atas 40 tahun.

Tabel 4. Domisili Responden

Domisili	Frekuensi	(%)
Surabaya Timur	27	27
Surabaya Barat	17	17
Surabaya Pusat	11	11
Surabaya Utara	20	20

Surabaya Selatan 25 25

<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
---------------	------------	------------

Dari Tabel 4., terlihat bahwa dari 100 responden, 27 orang atau 27% diantaranya berdomisili di Surabaya Timur, 17 orang atau 17% diantaranya berdomisili di Surabaya Barat, 11 orang atau 11% diantaranya berdomisili di Surabaya Pusat, 20 orang atau 20% diantaranya berdomisili di Surabaya Utara, dan sisanya sebanyak 25 orang atau 25% diantaranya berdomisili di Surabaya Selatan.

Tabel 5. Pekerjaan Responden.

Pekerjaan	Frekuensi	(%)
Pelajar/Mahasiswa	78	78
Buruh	22	21
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 5., terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 78 orang atau 78% diantaranya berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa serta sisanya sebanyak 22 orang atau 22% diantaranya berstatus sebagai buruh.

Tabel 6. Persepsi Responden

Persepsi	Frekuensi	(%)
Pro	84	84
Kontra	16	16
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 6., terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 84 orang atau 84% diantaranya memiliki persepsi pro tentang program jaminan pensiun yang harus diatur dalam UU Ciptaker secara jelas dan sistematis, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang atau 16% diantaranya memiliki persepsi kontra tentang program jaminan pensiun yang harus diatur dalam UU Ciptaker secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari analisis regresi logit biner:

Tabel 7. Uji Omnibus

Omnibus Tests	Chi-square	df	Sig.
Step	24,161	7	0,001
Block	24,161	7	0,001
Model	24,161	7	0,001

Dari Tabel 7., terlihat bahwa nilai *Chi-square* bernilai 24,161 dengan Sig. bernilai 0,001 yang berarti kurang dari alpha (0,10). Maka, keputusan menolak  $H_0$  artinya menerima  $H_1$ . Hal ini dapat menjelaskan bahwa penambahan dari variabel independen dalam model dapat memberikan pengaruh yang nyata. Dengan kata lain, model dalam penelitian ini dapat dikatakan telah fit.

Tabel 8. Ringkasan Model

-2log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
63,773	0,215	0,367

Dari Tabel 8., terlihat bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,367 dan *Cox & Snell R Square* sebesar 0,215. Hal ini berarti, sebesar 0,367 atau 36,7% merupakan kemampuan yang dimiliki variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model. Kemudian, nilai sebesar 0,633 atau 63,3% merupakan ketidakmampuan variabel independen yang dijelaskan oleh variabel lain dalam menjelaskan variabel dependen dalam model.

Tabel 9. Uji Hosmer dan Lameshow

Chi-square	df	Sig.
4,80	5	0,441

Dari tabel 9., *Chi-square* bernilai 4,8 dengan nilai sig 0,441. Terlihat bahwa, nilai Sig. lebih besar dari nilai *Chi-Square*. Maka, keputusan yang diambil adalah menerima  $H_0$  yang artinya menolak  $H_1$ . Kesimpulan yang diperoleh dari Uji *Hosmer dan Lameshow* adalah model pada penelitian

dapat diterima, sehingga pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan.

Tabel 10. Klasifikasi Model

Pengamatan	Prediksi		(% Ketepatan
	Pro	Kontra	
Pro	5	11	31,3
Kontra	1	83	98,8
Jumlah			88,0

Tabel 10., terlihat bahwa ketepatan model prediksi respons terbesar 88%. Ketepatan model dalam memprediksi respons pro diprediksi pro sebesar 31,3%, sedangkan respons kontra diprediksi kontra sebesar 98,8%.

Tabel 11. Uji Serempak

Source	Df	Adj Dev	Adj Mean	Chi- Square	P- Value
Regression	7	24.161	3.4516	24.16	0.001
Usia	2	13.759	6.8794	13.76	0.001
Domisili	4	12.585	3.1462	12.58	0.013
Pekerjaan	1	3.007	3.0074	3.01	0.083
Error	92	63.773	0.6932		
Total	99	87.934			

Dari tabel 11., terlihat *p-value* sebesar 0,001 yang berarti kurang dari *alpha* (0.10). Sehingga, keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$  yang artinya menerima  $H_1$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Estemasi parameter Regresi.

Variabel	$\beta$	S.E.	Sig.	$\pi$
Usia <sub>(1)</sub>	3,905	1,314	0,003	49,672
Usia <sub>(2)</sub>	2,195	1,836	0,232	8,984
Domisili <sub>(1)</sub>	2,538	1,361	0,062	12,652
Domisili <sub>(2)</sub>	2,536	1,628	0,119	12,630

Domisili <sub>(3)</sub>	0,271	1,103	0,806	1,312
Domisili <sub>(4)</sub>	-1,122	0,890	0,208	0,326
Pekerjaan <sub>(1)</sub>	1,422	0,825	0,085	4,144
Constant	-3,019	1,463	0,039	0,049

Ref : kategori terakhir

Dari Tabel 12., terlihat bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi adalah usia<sub>(1)</sub>, domisili<sub>(1)</sub>, dan pekerjaan<sub>(1)</sub> dengan referensi kategori terakhir pada masing-masing variabel pada taraf kesalahan 10%. Maka, diperoleh interpretasi sebagai berikut:

Nilai *odd ratio* usia<sub>(1)</sub> bernilai 49,673 yang artinya masyarakat dengan usia 18–25 tahun cenderung lebih pro terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara jelas dan sistematis dalam UU Ciptaker dibandingkan masyarakat dengan usia lebih dari 40 tahun.

Nilai *odd ratio* domisili<sub>(1)</sub> sebesar 12,652 yang artinya masyarakat yang berdomisili di Surabaya Timur cenderung lebih pro terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara jelas dan sistematis dalam UU Ciptaker dibandingkan masyarakat yang berdomisili di Surabaya Selatan.

Nilai *odd ratio* pekerjaan<sub>(1)</sub> bernilai 4,144 yang menyatakan bahwa masyarakat yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa cenderung lebih pro terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara jelas dan sistematis dalam UU Ciptaker dibandingkan masyarakat yang berstatus sebagai buruh. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan dibuat sebuah model berdasarkan variabel yang signifikan.

$$\pi(x) = \frac{\exp(g(x))}{1 + \exp(g(x))}$$

dengan model logit sebagai berikut:

$$g(x) = -3,019 + 3,905x_{1(1)} + 2,538x_{2(1)} + 1,422x_{3(1)}$$

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi logistik biner, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan usia 18–25 tahun, masyarakat yang berdomisili di Surabaya Timur, dan masyarakat yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa secara individu cenderung lebih pro terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara jelas dan sistematis dalam UU Ciptaker.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode *Survey* sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*. 4(2), 697-709.
- Astari, A. (2021). Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran KEMENDIKBUD No. 1035/E/KM/2020 di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum UNISSULA*. 37(1), 50-68.
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran *Philippe Nonet and Philip Selznick* Mengenai Hukum Konservatif. *Jurnal Sol Justicia*. 3(2), 165-188.
- Farza, R. R., Karsona, A. M., & Rubiati, B. (2019). Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 4(1), 150- 167.
- Gultom, F. & Fauzi, A. M. (2021). Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. *Journal of Law*. 4(1), 53-67.
- Jayanti, F. & Arista, N. T. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Kompetensi*. 12(2), 205-223.
- Kotimah, M. K. & Wulandari, S. P. (2016). Model Regresi Logistik Biner Statifikasi pada Partisipasi Ekonomi Perempuan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains dan Sen Pomits*. 3(1), 1-6.
- Nurmalasari. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Akademi Kebidanan Aisyiyah Pontianak. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 2(2), 184-197.
- Razy, M. F. & Ferdryansyah, M. (2020). Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2(2), 74-85.
- Sjaiful, M. (2021). Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Media Luris*. 4(1), 37-60.
- Soleh, A. (2003). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak di Jawa Timur. *Jurnal Legal Spirit*. 2(2), 1-15.
- Yunawati, S. (2016). Jenis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun pada PTPN V (PERSERO) Sei Rokan. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. 5(2), 116-124.
- Peraturan Perundang-Undangan  
 “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)”  
 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”  
 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1)”

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pasal 3”

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

BAB II Pasal (2)”

“Undang-Undang Nomor 18 Ayat 1”

“Undang-Undang Pasal 1 Ayat (15)”

“Undang-Undang Pasal 26 Ayat (1)”

“Undang-Undang Pasal 26 Ayat (2)” “TAP  
MPR No. III/MPR/2020 Pasal 2”